

**ABSTRAK**

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana interaksi antara *local government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penanganan kasus pencemaran di Kali Surabaya dan mengapa pencemaran tetap berlangsung meskipun *local government* sudah memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam penanganan kasus pencemaran di Kali Surabaya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus yang menekankan pada *multievidence* dari hasil wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumen yang relevan. Analisa data dilakukan dengan pengkategorian dan pengkombinasian bukti dan menetapkan serangkaian keterkaitan timbal-balik mengenai fenomena tersebut.

Kesimpulan yang didapat adalah interaksi antara *local government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penanganan kasus pencemaran di Kali Surabaya belum menciptakan *partnership* yang berdasarkan *trust* dan *respect*. *Local government* terutama Bapedal Propinsi Jawa Timur belum bisa memfasilitasi kepentingan ekonomi lingkungan dari *private sector* dan kepentingan kelestarian lingkungan dari *civil society*. *Civil society* telah berhasil menjalankan fungsinya yaitu *informing private sector* mengenai hasil pemantauan limbah cair yang kemudian ditindaklanjuti. Industri juga belum menjalankan fungsinya untuk *framing government*, tidak adanya *trust* dan *respect* terhadap pemerintah lokal yang melakukan pengawasan pencemaran lingkungan, industri lebih memilih menggunakan jalan pintas dengan melihat kondisi pemerintah yang korup.

Pencemaran di Kali Surabaya tetap berlangsung karena lemahnya koordinasi antara dinas dan badan yang terkait dengan pengelolaan Kali Surabaya ditambah dengan lemahnya penegakan hukum. Dan yang belum bisa dirubah adalah tata ruang di sepanjang Kali Surabaya yang sudah diselewengkan, dimana seharusnya menjadi daerah resapan malah digunakan sebagai lahan usaha dan tempat tinggal, maka pencemaran tetap akan ada.